

## Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Dinas Koperasi Kabupaten Minahasa

*Jurnal Administrativus Vol 2 No 4, E-ISSN 3026-3018*

© Tahun IAN FISH UNIMA. All right reserved ISSN

**Gracesyela E. F. Torar<sup>1</sup>, Marthinus Mandagi<sup>2</sup>, Steven V. Tarore<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Manado Indonesia

<sup>1</sup> Gracesyelaaft21@gmail.com; <sup>2</sup> Marthinusmandagi@unima.ac.id; <sup>3</sup> Steventarore@gmail.com

---

### INFO ARTIKEL

### ABSTRACT

**Key word:**

Strategy,  
Empowerment  
UKM

Accepted: 5 Oktober 2024

Revised : 10 Oktober  
2024

Published: 31 Oktober  
2024

The aim of this research is to find out how to analyze and describe a strategy for empowering small and medium-sized enterprises in the Minahasa co-operative department. The research method used is descriptive dermatative. The number of informants in this study is four. Data collection using observation, interview and documentation techniques. Data analysis through Data Reduction, Data Presentation and Conclusion Drawing. The results of the research show that the Strategy for Empowerment of Human Resources and Small and Medium-sized Enterprises in Improving the Economic Welfare of Minahasa District is by empowering the growth of new entrepreneurs, in addition to by developing new enterprises in rural areas, providing training such as culinary, giving instructions such as how to market its products so that they are known to the public. The factor that affects the impact of empowerment is that the Department selects new entrepreneurs, besides the entrepreneur can grow and enhance the enterprises they create. Then the service gave them the motivation and incentive to continue to develop their endeavours.

---

### INTISARI

**Kata kunci:**

Strategi  
Pemberdayaan  
UKM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis dan mendeskripsikan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dalam di Dinas Koperasi Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Analisis data melalui Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi pemberdayaan Tahap Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Usaha Kecil Menengah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Kabupaten Minahasa yaitu dengan cara pemberdayaan penumbuhan wirausaha baru, selain itu dengan cara mengembangkan usaha-usaha baru di daerah pedesaan, memberikan pelatihan-pelatihan seperti kuliner, memberikan arahan seperti bagaimana cara memasarkan produknya supaya dikenal dikalangan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi dampak dari pemberdayaan yaitu pihak Dinas mencetak pelaku-pelaku usaha baru, selain itu pelaku usaha baru bisa menumbuhkan dan meningkatkan usaha-usaha-usaha yang mereka ciptakan. Selanjutnya dinas memberi motivasi dan dorongan agar mereka terus mengembangkan usahanya.

## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional[1], Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah[2] , dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) [3]

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026, memperhatikan: (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kabuapten Minahasa sampai dengan tahun 2023; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

Menurut Pasal 33 Tahun 1945, perekonomian dibentuk sebagai usaha kolektif berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 33 yang menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat lebih penting daripada kemakmuran pribadi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (MKMM) harus diberikan prioritas yang lebih tinggi dalam pembangunan negara. Untuk itu, perlu ada strategi yang sistematis, erntegrasi, dan berkelanjutan untuk mendukung koperasi dan usaha mikro kecil menengah di Indonesia. Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2024-2026 disusun sebagai acuan/ pedoman dalam menyusun Renja tahunan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 4 (empat) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. Sasaran startegisnya adalah: Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Jumlah Koperasi yang Berkualitas 6, Meningkatkan Jumlah Koperasi yang aktif Jumlah Koperasi yang aktif 14, Meningkatkan Jumlah Koperasi dan UMKM yang memiliki keunggulan Kompetitif Jumlah UKM yang menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing berbasis sumber daya lokal 30.

Rencana Strategis (RENSTRA) berikut mengacu pada program yang ditawarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Minahasa untuk mendukung pengembangan UKM:1. Mewujudkan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang meningkat modal usahanya. 2. Mewujudkan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berprestasi. 3. Mewujudkan Pertumbuhan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) 4. Mewujudkan Kemitraan UKM dan SDM Pengelola Koperasi yang berkualitas. Dalam rangka pembinaan Koperasi dan UKM di Kabupaten Minahasa perlu diperhatikan adalah dengan diberlakukannya otonomi daerah dimana daerah memiliki peran dan kewenangan dalam proses pembangunan Koperasi dan UMKM, maka sudah selayaknya upaya pemberdayaan ekonomi rakyat termasuk Koperasi dan UMKM untuk selalu ditinjau perkembangannya.

Isu strategis dalam pembinaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Minahasa adalah harus mampu untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif dalam berkontribusi bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan potensi sumber daya lokal, berlandaskan semangat kewirausahaan dan sinergitas stake holder koperasi dan UMKM.Strategi adalah rencana yang cermat dan teliti yang telah disiapkan sebelumnya secara matang mengenai kegiatan yang akan dilakukakn untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Seperti strategi dagang). Strategi juga bisa di katakan ilmu dan senin (menggunakan siasat, akal, dan sebagainya) memimpin tantara menghadapi musuh dalam suatu [pertempuran (peperangan) [4]Koperasi memainkan peran penting dalam kemajuan ekonomi daerah. Berbagi program koperasi seperti simpan pinjam, ultra mikro, dan lainnya mungkin membantu usaha kecil dan mendorong bisnis yang membutuhkan bantuan[5]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai berikut: 1. Usaha Mikro didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 1 sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh individu dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.2. Menurut Pasal 1 Ayat 2 dari Undang-Undang ini, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dan memenuhi kriteria Usaha Kecil. 3. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang ini, "usaha menengah" adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang diatur dalam Undang-Undang ini.[6]Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, ada beberapa definisi yang berbeda dari "usaha kecil" menengah (UKM).

Namun, menurut Undang-Undang tersebut, UKM diklasifikasikan berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan selama satu tahun, dengan kriteria sebagai berikut: 1.) Tidak termasuk tanah dan bangunan komersial, usaha kecil tidak boleh memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (50 juta rupiah); 2.) Penjualan tahunan lebih dari 300 juta (300 juta) hingga 2,5 miliar (2 miliar dan 5 juta) 3.) Perusahaan menengah memiliki aktiva bersih lebih dari 500 juta rupee India (500 juta rupiah) dan hingga 10.000.000.000,00 rupee India (crores), tanpa tanah dan bangunan; 4.) Penjualan setiap tahun melebihi 2,5 milyar rupiah (2,5 milyar rupiah), dengan nilai tertinggi mencapai 50 milyar rupiah. Bisnis kecil dan menengah (UKM) memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang daya tahan terhadap krisis ekonomi 1998. Ini karena UKM lebih fleksibel daripada perusahaan besar. [7]

Tujuan Rencana Strategis Dinas Koperasi Dan Ukm Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada table berikut:

<i>VISI : Minahasa yang mandiri dan Sejahtera</i>			
<i>MISI II : Mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan budaya Mapalus</i>			
<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Arah Kebijakan</i>
<i>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Bidang Koperasi dan UKM</i>	<i>Meningkatkan Kualitas Koperasi</i>	<i>Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan Koperasi dan UKM</i>	<i>Kebijakan Penguatan dan perluasan peran system pendukung usaha Koperasi dan UKM</i>
	<i>Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha</i>	<i>Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UKM</i>	<i>Kebijakan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah</i>
		<i>Pengembangan permodalan Koperasi dan UKM</i>	<i>Kebijakan pengembangan usaha baru Koperasi dan UKM</i>
		<i>Meningkatkan jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT</i>	<i>Kebijakan Peningkatan kelembagaan Koperasi</i>
		<i>Meningkatnya rata-rata jumlah penyerapan tenaga kerja koperasi dan UMKM</i>	<i>Kebijakan pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja</i>
<i>MISI III: Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi dan Kepastian Hukum</i>			
<i>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan stakeholder terhadap Pelayanan Perangkat Daerah</i>	<i>Meningkatnya Kinerja dan Kepuasan stakeholder terhadap Pelayanan Perangkat Daerah</i>	<i>Kebijakan kemudahan perijinan dalam Usaha Mikro</i>

Berdasarkan dengan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa di temukan adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait strategi pemberdayaan, terlebih khusus pada strategi pengembangan permodalan koperasi dan UKM, serta strategi meningkatnya rata-rata jumlah penyerapan jumlah tenaga kerja koperasi dan UMKM. Dimana diantara 2.130 Pelaku UKM, beberapa diantaranya memiliki masalah-masalah terkait strategi-strategi tersebut. Dari Bidang UKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa juga, ditemukannya permasalahan UKM berkaitan dengan masih lemahnya pemberdayaan Koperasi, Lemahnya kualitas kelembagaan dan pengawasan UKM, Kurangnya pengembangan permodalan UKM.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dilaksanakan di Kantor Kelurahan Lowu Utara Kecamatan Ratahan dengan fokus penelitian pada Program Bantuan Pangan Non Tunai. Sumber data dalam wujud yaitu 1) data primer yaitu Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. dan 2) data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Teknik Pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data, menggunakan analisis data model interaktif untuk menguji data yaitu:

a) Reduksi Data, b) Penyajian Data, c) Menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi.[8]. Teknik Keabsahan Data, Pengujian keabsehan data, peneliti menggunakan empat kriteria utama yaitu: a). Derajat Kepercayaan, b). Derajat keterahlian,

c). Derajat Kepastian.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026, memperhatikan: (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kabuapten Minahasa sampai dengan tahun 2023; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

Menurut Pasal 33 Tahun 1945, perekonomian dibentuk sebagai usaha kolektif berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 33 yang menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat lebih penting daripada kemakmuran pribadi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus diberikan prioritas yang lebih tinggi dalam pembangunan negara. Untuk mencapai hal ini, strategi yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan diperlukan untuk mendukung koperasi dan usaha mikro kecil menengah di Indonesia.

Sebagaimana sudah dijelaskan pada hasil penelitian ini difokuskan pada strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa, yang dikaji dari: 1.) Sumber daya manusia, 2.) Faktor yang mendukung. Berdasarkan temuan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat ([9]. Nawawi Hadari menjelaskan tiga pengertian dari sumber daya manusia, yaitu ([10] :

1. Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja untuk suatu organisasi. Mereka juga dikenal sebagai personil, tenaga kerja, pegawai, atau karyawan.
2. Potensi manusia sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya dikenal sebagai sumber daya manusia.
3. Sumber daya manusia adalah potensi dan aset yang berfungsi sebagai modal (non material atau non finansial) dalam organisasi. Potensi ini diwujudkan secara fisik dan non fisik untuk menjamin eksistensi organisasi.

Dari pendapat diatas maka peneliti berpendapat bahwa sumber daya manusia sangat penting dalam pelayanan public. Karena baik buruknya pelayanan yang diberikan tergantung pada sumber daya manusia yang terlibat didalamnya. Sumber daya manusia dapat dikatakan merupakan salah satu factor penggerak yang penting dalam organisasi. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas tentunya akan sangat membantu dalam instansi atau organisasi.

Pelayanan public sangat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat, karena pelayanan public yang baik dapat menciptakan citra atau hasil kerja yang baik pula. Namun, pelayanan public yang baik tentunya sangat di pengaruh oleh sumber daya manusia, dimana sumber daya manusia menjadi tolak ukur dalam menentukan suatu pekerjaan dilakukakn dengan baik atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat di Kabupaten Minahasa, dapat ditarik kesimpulan bahwa Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Kabupaten Minahasa, tahap pemberdayaan sumber daya manusia dan usaha kecil menengah mencakup mendorong pertumbuhan wirausaha baru, mengembangkan usaha baru di daerah pedesaan, memberikan pelatihan seperti kuliner, dan memberikan petunjuk tentang cara memasarkan produk mereka agar dikenal masyarakat. Setelah pelatihan, pelaku usaha diarahkan untuk menerapkan pengetahuan mereka di kelompoknya, seperti perkumpulan PKK, dan mengembangkan pengetahuan mereka di kelompoknya. Mereka juga diarahkan untuk membuat inovasi baru agar usaha mereka dikenal masyarakat. Dalam menanggulangi pengangguran sangat diperlukan tumbuhnya wirausahawan-wirausahawan baru yang kreatif dan inovatif. Di samping itu, dengan perkembangannya wirausaha juga akan bertambah banyaknya pelaku-pelaku bisnis baru dan hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Istilah manajemen dalam bahasa inggrisnya "*management*" beberapa bahasa seperti: (1) bahasa latin, yakni "*managiere*" yang artinya melakukan, melaksanakan, Mengurus sesuatu; (2) bahasa italia "*maneggiare*" artinya melatih kuda, mengetak-etakan kaki kuda, atau secara harafiah berarti mengendalikan = *to handle*; (3) bahasa prancis, yaitu "*manege*" atau "*manage*", artinya tindakan membimbing, Memimpin, Mengemudikan,

Mengurus, Memerintah, dan kata “*manage*” juga berarti “tempat latihan kuda” “perjinakan kuda” dan dalam bahasa Inggris yang biasa disebut *to manage* yang artinya mengendalikan, menangani, menguasai, mengurus, menyelesaikan sesuatu [11]

Manajemen adalah “suatu proses yang membedakan suatu proses yang pengorganisasian, pergerakan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya” [12] Fungsi-fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan.

- 1.) Pendefinisian tujuan, penetapan strategi, dan pengembangan rencana adalah semua bagian dari perencanaan.
- 2.) Pengorganisasian berarti menentukan pekerjaan apa saja yang dilakukan, siapa yang mengerjakan pekerjaan itu, bagaimana pekerjaan itu dikelompokkan, siapa yang melaporkannya, dan pada tingkat mana keputusan harus dibuat.
- 3.) Memberikan arahan, memilih cara terbaik untuk berkomunikasi, dan memecahkan konflik adalah semua contoh kepemimpinan.
- 4.) Salah satu bagian dari pengendalian adalah memantau tindakan untuk memastikan bahwa semua orang mencapai tujuan dan memperbaiki kesalahan [13]

Perencanaan strategis adalah suatu kerangka berpikir yang menentukan di mana Anda saat ini, ke mana Anda ingin pergi, dan bagaimana Anda bisa mencapainya. Ia juga merupakan proses yang membantu para pemimpin merencanakan masa depan. Ia mengubah cara manajemen memikirkan dan menyebarkan sumber daya selama program berlangsung.

Dengan kata lain, perencanaan berkaitan dengan bagaimana keputusan yang dibuat saat ini akan berdampak pada masa depan. atau disebut sebagai masa depan keputusan saat ini.

McNamara menggambarkan perencanaan strategis sebagai menetapkan tujuan organisasi untuk tahun-tahun mendatang dan strategi untuk mencapainya. Perencanaan strategis dapat dilakukan untuk seluruh organisasi atau untuk bagian-bagian utamanya, tetapi biasanya mencakup seluruh organisasi. Penyusunan perencanaan strategis terdiri dari tiga tahap: diagnosis, perencanaan, dan penyusunan dokumen rencana. Diagnosis dimulai dengan mengumpulkan informasi perencanaan untuk penelitian. Penyusunan dokumen rencana strategis adalah langkah berikutnya setelah perencanaan dimulai dengan menetapkan visi dan misi. Rumusan dalam hal ini tidak perlu terlalu panjang agar manajemen dapat memahami dan menerapkannya. Rencana strategis dapat dibuat setelah pengkajian selesai.

Rencana strategis, yang terdiri dari visi, misi, isu utama, dan strategi pengembangan, harus didasarkan pada rencana operasional lima tahunan, yang mencakup program kerja/kegiatan, sasaran, dan tahapannya. Setelah itu, rencana operasional tahunan dibuat, yang mencakup proyek/kegiatan, sasaran, dan data atau alasan pendukung. Seperti yang telah dijelaskan, rencana kerja harus disesuaikan dengan visi dan misi. Program sekolah atau madrasah juga harus disesuaikan dengan visi dan misi tersebut agar organisasi tersebut dapat berkembang secara optimal. Agar program RKS dapat dilaksanakan, perencanaan program dan kegiatan harus terukur dan realistis.

## **2. Faktor Yang Mendukung**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat di Kabupaten Minahasa, dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat pemberdayaan adalah bahwa dinas mencetak pebisnis baru dan memungkinkan pebisnis baru untuk menumbuhkan dan meningkatkan bisnis mereka. Selain itu, dinas mendorong mereka untuk terus mengembangkan bisnis mereka. Pelatihan seperti kerajinan tangan, kerajinan kuliner, dan pembuatan barang unik memungkinkan peluang usaha yang besar. Selain itu, pihak dinas juga bertanggung jawab atas pengemasan, pemasaran, dan promosi produk. Ini memungkinkan produk mereka untuk berkembang dan maju.

Pemberdayaan, juga dikenal sebagai empowerment dalam bahasa Inggris, adalah ide yang muncul di wilayah Eropa pada akhir tahun 1970-an dan masih ada hingga hari ini. Ife mengatakan bahwa pemberdayaan pada awalnya mengacu pada upaya untuk memberikan wewenang, tanggung jawab, dan kepercayaan kepada setiap anggota masyarakat agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik.

Chambers berbeda dengan definisi Ife dan mengatakan pemberdayaan adalah konsep yang digunakan dalam pembangunan ekonomi yang mengandung nilai-nilai sosial. Pendapat ini kemudian berkembang menjadi definisi yang lebih luas, di mana pemberdayaan digunakan untuk merencanakan masa depan yang lebih baik, sehingga stabilitas ekonomi dan sosial dapat dipertahankan, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau mencegah kemiskinan. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan mengacu pada kekuatan atau potensi masyarakat itu sendiri [14]

Seiring dengan Hurairah, Fahrudin mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya dan potensi masyarakat. Sedarmayanti juga mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun masyarakat yang mandiri. [15]

Dalam tulisannya, Nadifa juga mengatakan bahwa pemberdayaan yang baik adalah yang berfokus pada

meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya manusia sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk hidup dan memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada orang lain.[16]

Namun, menurut Stainer, perencanaan strategis adalah suatu kerangka berpikir yang menetapkan di mana Anda berada, ke mana Anda ingin pergi, dan bagaimana Anda bisa sampai di sana. Ia juga merupakan proses yang membantu para pemimpin membuat visi untuk masa depan. Ia mengubah cara manajemen berpikir dan menyebarkan sumber daya selama pelaksanaan program. Dengan kata lain, perencanaan berkaitan dengan akibat yang akan ditimbulkan oleh keputusan yang dibuat saat ini. atau disebut sebagai masa depan keputusan saat ini.

McNamara menggambarkan perencanaan strategis sebagai menetapkan tujuan organisasi untuk tahun-tahun mendatang dan strategi untuk mencapainya. Perencanaan strategis dapat dilakukan untuk seluruh organisasi atau untuk bagian-bagian utamanya, tetapi biasanya mencakup seluruh organisasi. Penyusunan perencanaan strategis terdiri dari tiga tahap: diagnosis, perencanaan, dan penyusunan dokumen rencana. Menetapkan visi dan misi adalah tahap pertama perencanaan, dan dokumen rencana strategis adalah tahap terakhir. Rumusan dalam hal ini tidak perlu terlalu panjang agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh tim manajemen. Setelah pengkajian selesai, rencana masa depan dapat dibuat.

Rencana strategis dibuat sebelum rencana operasional lima tahunan, yang mencakup visi, misi, isu utama, dan strategi pengembangan. Rencana ini mencakup program kerja/kegiatan, sasaran, dan tahapannya. Setelah itu, rencana operasional tahunan dibuat, yang mencakup proyek/kegiatan, sasaran, dan data atau alasan pendukung. Seperti yang telah dijelaskan, rencana kerja harus disesuaikan dengan visi dan misi. Program sekolah atau madrasah juga harus disesuaikan dengan visi dan misi tersebut agar organisasi tersebut dapat berkembang secara optimal. Agar program RKS dapat dilaksanakan, perencanaan program dan kegiatan harus terukur dan realistis

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah dipaparkan dan diuraikan pada bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan bahwa strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat di Dinas Koperasi Kabupaten Minahasa serta Faktor-faktor yang mendukung Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Masyarakat di Dinas Koperasi Kabupaten Minahasa masih belum maksimal atau belum berjalan dengan semestinya dikarenakan, sumber daya manusia dalam hal ini pegawai yang bertugas pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa masih kurang menguasai dalam pekerjaan atau tanggungjawab terhadap bidangnya serta Keuangan merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan UKM di Kabupaten Minahasa, namun dalam hal ini pemberian modal keuangan atau dana oleh dinas Koperasi dan UKM masih kurang memadai. Selain Keuangan, masih kurangnya pengetahuan oleh para pelaku UKM terkait sosialisasi yang dilakukan, program yang dijalankan, dan manfaat dari pemberdayaan UKM.

#### REFERENSI

- [1] Pemerintah Pusat, Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta, Indonesia , 2004.
- [2] Pemerintah Pusat, Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Indonesia , 2014.
- [3] Kementerian Dalam Negeri, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Jakarta, Indonesia , 2017.
- [4] Telly Sumbu, Merry E. Kalalo, Engalien R. Palandeng, and Jhony Lumolos, Kamus Umum Politik & Hukum: Pengertian Desa, Cetakan Pertama. Jakarta : Jala Permata Aksara , 2010.
- [5] F. S. Solang, J. E. Kaawoan, and I. Sumampouw, "Strategi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat Di Kabupaten Minahasa," Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan , vol. Volume 3, Nomor 3, no. ISSN : 2337-5736, pp. 3–10, Oct. 2019.
- [6] R. Firmansyah, R. N. Pratiwi, and Riyanto, "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Madiun (Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun) ," JAP: Jurnal Administrasi Publik (Mahasiswa Brawijaya), vol. Volume 2, Nomor 1, pp. 154–160, 2014.
- [7] L. Fitriani, M. Ali, and L. H. Maniza, "Efektivitas Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Pada Dinas Koperasi Dan UKM Povinsi NTB," Jurnal of Applied Business and Banking (JABB) , vol. Volume 2, Nomor 1, pp. 46–65, Mar. 2021.

- [8] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta, 2016.
- [9] M. S. P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan . Bandung : PT. Bumi Aksa , 2007.
- [10] N. Hadari, Perencanaan Sumber Daya Manusia . Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2008.
- [11] L. E. Masengi Evi Elvira, Asas - Asas Manajemen. malang: wineka media, 2019.
- [12] Lumingkewas dan Masengi, Pengantar Administrasi Publik . Bandung : Bumi Aksara , 2019.
- [13] E. Satispi, Teori Dan Perkembangan Menejemen Pelayanan Publik . UMJ Press, 2022.
- [14] R. Pusut, M. Kimbal, and M. Mamentu, “Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso,” Jurnal Eksekutif , vol. Volume 2, Nomor 2, 2017.
- [15] A. Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial . Bandung : PT. Refika Aditama , 2012.
- [16] F. Nadhifa, Peranan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone (skripsi). Makassar. Makassar: Universitas Hasanuddin., 2017.